

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Bidang kesejahteraan sosial dipahami sebagai disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, permasalahan sosial, dan program pelayanan sosial. Kesejahteraan sosial memberikan upaya dalam mengembangkan pengetahuan, penyebab, dan strategi dalam penanggulangan masalah sosial.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup layak, berkembang, dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan sosial menurut UU No. 6 Th, 1974 Pasal 2 ayat 1 adalah suatu kondisi yang mencakup kehidupan sosial baik material maupun spiritual yang aman, bermoral, dan tenteram, sehingga memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya dengan baik, sambil menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya fungsi dan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

Ilmu pekerjaan sosial berkembang dari pemikiran para filantropis yang sekaligus menjadi relawan. Profesi ini menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam interaksi dan hubungan dengan lingkungan sosial. Penekanan pada aspek ini membedakan pekerjaan sosial dari profesi pertolongan lainnya.

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Profesi pekerja sosial telah ada sejak lama dan berbeda dari profesi lain karena seorang pekerja sosial memperhatikan klien beserta lingkungannya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa pekerja sosial profesional adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta dengan kompetensi pekerja sosial. UU No. 14 Tahun 2019 menambahkan bahwa praktik pekerja sosial adalah bantuan profesional yang terstruktur, terpadu, berkelanjutan,

dan terawasi untuk mencegah disfungsi sosial pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang berfokus pada pemberian layanan profesional untuk membantu individu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tugas-tugas yang diemban membedakan profesi ini dari pekerjaan sosial lainnya. Menurut Iskandar (2013), fungsi utama pekerja sosial dalam sistem kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standard kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.3 Peran Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial memiliki berbagai peran dalam pembimbingan sosial. Lima (5) di antaranya sangat relevan untuk dipelajari oleh para pekerja sosial yang akan memberikan pendampingan sosial:

1. Fasilitator

Visi pekerjaan sosial menekankan bahwa perubahan terjadi terutama karena upaya klien sendiri. Peran pekerja sosial adalah membantu dan mendukung klien untuk mencapai perubahan yang telah disepakati bersama. Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994) yang dikutip oleh Edi Suharto (2017, hlm. 98) menyajikan panduan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

- a. Merumuskan keanggotaan atau pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengidentifikasi isu-isu yang perlu diselesaikan
- c. Menghargai pengalaman dan perbedaan, serta mendorong komunikasi dan hubungan yang baik.
- d. Memelihara relasi dan sinergi dalam sistem.
- e. Menyusun tujuan keterlibatan yang jelas.
- f. Memfasilitasi penetapan tujuan bersama.
- g. Menyusun alternatif solusi untuk permasalahan yang ada.
- h. Mencari kesamaan dan perbedaan untuk memperkuat sinergi sistem.
- i. Mengatasi konflik yang muncul

2. Broker

Perannya sebagai broker, pekerja sosial berfungsi untuk mengatur transaksi dalam jaringan layanan sosial. Menurut Edi Suharto (2017, hlm. 99), pemahaman mereka mengenai kualitas layanan di lingkungannya sangat penting untuk memastikan klien mendapatkan manfaat yang optimal.

3. Mediator

Pekerja sosial sering mengambil peran mediator dalam beragam aktivitas bantuannya. Fungsi ini diperlukan khususnya ketika terdapat kejelasan dari perbedaan yang memicu konflik antara berbagai pihak.

Edi Suharto (2017, hlm. 101) mengutip Compton dan Galaway (1989) yang menawarkan berbagai teknik dan keterampilan yang bermanfaat demi menjalankan perannya sebagai mediator:

- a. Memfasilitasi komunikasi dengan mendorong pihak-pihak agar bersedia berdialog satu sama lain.
- b. Membantu masing-masing pihak untuk mengakui keabsahan kepentingan pihak lain.
- c. Mengidentifikasi kepentingan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
- d. Mencari kesamaan nilai di antara pihak-pihak yang berselisih.
- e. Berupaya untuk mengurangi konflik dengan memfokuskan pada isu, waktu, dan tempat tertentu.
- f. Mengelompokkan konflik menjadi beberapa isu yang lebih kecil.

g. Menghindari situasi yang berpotensi menciptakan kondisi saling mengalahkan.

4. Pembela

Pekerja sosial berfokus pada perlindungan hak dan kepentingan klien, menyediakan layanan yang diperlukan, serta mengembangkan program. Rothblatt (1978) dalam Edi Suharto (2017, hlm. 102) mengemukakan beberapa model sebagai acuan dalam melaksanakan peran pembela dalam pendampingan sosial:

- a. Dukungan: mendorong partisipasi yang luas dari semua pihak.
- b. Kepekaan: mendorong para pengambil keputusan untuk secara aktif mendengarkan dan mempertimbangkan kepentingan serta posisi orang lain.
- c. Perwakilan menyeluruh: mewakili semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pembuatan keputusan.
- d. Informasi: menyajikan pandangan masing-masing secara kolektif dengan dukungan dokumen dan analisis yang sesuai.
- e. Keadilan: memperjuangkan sistem yang setara atau adil, sehingga perbedaan posisi dapat dikenali untuk tujuan perbandingan.

5. Pelindung

Kewajiban dari pekerja sosial kepada masyarakatnya dikokohkan hukum dengan adanya legitimasi yang berfungsi sebagai *protector* bagi individu-individu tidak berdaya serta sifatnya yang rentan. Bertindak menjadi *guardian*, pekerja sosial melaksanakannya sesuai dengan

kepentingan para korban, calon korban, serta kelompok yang memiliki risiko.

Peran sebagai pelindungnya meliputi sejumlah kecakapan ahli yang berkaitan dengan: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, disertai (d) pengawasan sosial. Berbagai tugasnya dalam peran pelindung, mengacu Edi Suharto (2017, hlm. 103), yakni:

- a. Mengidentifikasi klien utama bagi pekerja sosial.
- b. Memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur perlindungan yang berlaku.
- c. Melakukan komunikasi dengan seluruh pihak yang dipengaruhi oleh tindakan, dengan mempertimbangkan tanggung jawab etis, hukum, dan praktik yang rasional dalam pekerjaan sosial.

2.3 Konsep Masalah Sosial

Masalah sosial adalah keadaan yang menggambarkan perbedaan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang mengindikasikan ketidakcocokan antara unsur-unsur budaya masyarakat, yang merasakan akibat dari masalah tersebut. Pada dasarnya, masalah sosial terkait dengan nilai dan norma sosial di dalam lingkungan masyarakat.

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial dapat diartikan sebagai kondisi yang mengancam kepentingan individu atau kelompok. Selain itu, masalah sosial sering kali dilihat sebagai realitas sosial yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Dalam

perspektif sosiologis, masalah sosial terjadi ketika ada suatu realitas yang muncul dan berbeda dari keadaan ideal yang diharapkan dalam masyarakat tertentu.

Soerjono Soekanto (2015: 312) menjelaskan bahwasanya permasalahan sosial diuraikan menjadi ketidakselarasan dari adanya berbagai unsur budaya atau kelompok masyarakat yang bisa mengancam dari eksistensi kelompok sosialnya sendiri. Perbedaannya muncul pada aspek budaya dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi kehidupan masyarakat.

Suatu masalah sosial muncul ketika individu atau kelompok menganggap bahwa realitas tertentu merupakan masalah. Pendapat ini berasal dari pemahaman masyarakat umum, bukan dari analisis sosiologis. Para ahli sosiologi berfungsi untuk menjelaskan mengapa situasi tersebut dianggap bermasalah oleh beberapa orang. Namun, kritik sering muncul karena masyarakat seringkali tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa itu masalah sosial.

2.3.2 Komponen Masalah Sosial

Fenomena yang beragam di lingkungan masyarakat dapat mengakibatkan permasalahan sosial. Namun, tidak semua fenomena tersebut memenuhi kriteria sebagai masalah sosial. Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat (4) faktor yang membentuk masalah sosial:

1. Faktor Ekonomis

Masalah sosial mencakup kemiskinan, pengangguran, dan sejenisnya.

Pada konteks ini, kemiskinan terbagi menjadi dua jenis yakni kemiskinan struktural beserta absolut.

2. Faktor Biologis

Masalah sosial ini mencakup isu yang harus ditangani terlebih dahulu.

Dalam masyarakat, ada penyakit yang dapat menular, seperti HIV/AIDS, SARS, dan Covid.

3. Faktor Psikologis

Masalah sosial juga meliputi kondisi seperti depresi, gangguan mental, stres, tekanan emosional, dan perilaku tidak normal lainnya.

4. Faktor Sosial dan Kebudayaan

Masalah sosial juga mencakup isu-isu seperti perceraian, pelecehan seksual, tindakan kriminal, kenakalan remaja, konflik ras, krisis moneter, dan berbagai masalah lainnya.

Pada dasarnya, masalah sosial adalah bagian dari kehidupan. Hal ini dikarenakan masalah sosial muncul sebagai akibat dari kebudayaan manusia dan hubungan mereka dengan orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan yang diciptakan oleh individu dapat menyebabkan komponen masalah sosial muncul di tempat mereka tinggal.

2.4 Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial dinyatakan sebagai serangkaian berlangsungnya aktivitas tujuannya demi meningkatkan interaksi dengan komunitas, meliputi berbagai tindakan yang diambil oleh individu guna meraih kenaikan kualitas hidup bagi masyarakatnya. Konsep pelayanan sosial memberi pelayanan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat sesuai kondisi yang mereka butuhkan. Pelayanan sosial tidak terlepas dari kegiatan menolong atau membantu seseorang.

2.4.1 Pengertian Pelayanan Sosial

KBBI mendefinisikan pelayanan sebagai upaya demi menunjang ataupun pemberian bantuan pada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Pelayanan sosial merupakan layanan yang diberikan pada waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan sosial, dan kerap disebut pula sebagai pelayanan kesejahteraan sosial.

Dikenal sebagai kesejahteraan sosial, pelayanan sosial adalah sistem yang memiliki struktur yang baik. Hal ini menjadi bagian dari usaha dan lembaga sosial yang bertujuan membantu individu dan kelompok dalam mencapai hubungan yang baik, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan potensi serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2.4.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda tergantung pada tujuan klasifikasi yang dimaksud. PBB menyampaikan fungsi pelayanan sosial menjadi:

1. Mobilisasi dan penciptaan sumber daya masyarakat untuk tujuan Pembangunan
2. Pengembangan sumber daya manusia.
3. Penyediaan dan pengaturan struktur kelembagaan agar pelayanan yang terorganisasi dapat berjalan dengan baik.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. Orientasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan adaptasi yang diperlukan

Fungsi tambahan dari pelayanan sosial adalah mendorong partisipasi anggota masyarakat dalam menangani masalah sosial. Tujuannya mencakup terapi individu dan sosial guna meningkatkan rasa percaya diri individu dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dalam pembagian sumber daya dan kekuasaan politik.

2.5 Tinjauan tentang Dukungan Keluarga

Friedman (1998) dalam Suprajitno (2004) mendefinisikan keluarga sebagai sekelompok dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ikatan emosional dan aturan tertentu, di mana setiap individu memiliki peran masing-masing dalam struktur keluarga. Sementara itu, BKKBN (1999) dalam Sudiharto (2007) menyatakan bahwa keluarga terdiri dari satu atau lebih individu yang terikat oleh ikatan perkawinan yang sah, dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak baik secara spiritual maupun material, serta menjalin hubungan harmonis dengan sesama anggota keluarganya bersamaan dengan lingkup pihak masyarakat dalam lingkungan mereka.

Duvall (dalam Mubarak dkk., 2006) menambahkan bahwa keluarga dapat dijelaskan menjadi kumpulan individu terkoneksi melalui jenjang perkawinan, pengadopsian, ataupun garis keturunan, dengan tujuan untuk membangun bersamaan melestarikan budayanya bersama serta mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial masing-masing anggota. Mengacu pendefinisian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan Kumpulan dua orang atau

lebih yang terikat oleh prinsip-prinsip untuk mendukung dan mengembangkan aspek fisik, mental, emosional, dan sosial dari masing-masing anggota

Selain itu, Akhmadi (2007) menyebutkan bahwa keluarga memiliki karakteristik khusus, yakni:

1. Keluarga memiliki karakteristik yang bersifat universal, yaitu sebagai bentuk yang mendasar dari semua organisasi sosial.
2. Dasar emosional yang dimiliki keluarga mencakup kasih sayang, cinta, dan kebanggaan terhadap suatu ras.
3. Keluarga memberikan pengaruh normatif, berfungsi sebagai lingkungan sosial pertama bagi individu dan membentuk karakter mereka.
4. Keluarga terdiri dari jumlah anggota yang terbatas.
5. Posisi keluarga sangat sentral dalam struktur sosial.
6. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab terhadap satu sama lain.
7. Terdapat aturan sosial yang homogen dalam keluarga.

Friedman (1999) dalam Sudiharto (2007) menyatakan bahwa fungsi keluarga dapat dibagi menjadi lima (5) kategori, yakni:

1. Fungsi Afektif

Fungsi internal keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan psikososial, saling merawat, memberikan kasih sayang, serta saling menerima dan mendukung satu sama lain.

2. Fungsi Sosialisasi

Proses ini melibatkan perkembangan dan perubahan individu dalam keluarga, di mana anggota keluarga saling terkoneksi secara sosial dan belajar menjalankan peran mereka dalam lingkungan sosial.

3. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga berperan dalam memastikan kelangsungan keturunan dan meningkatkan jumlah sumber daya manusia

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga adalah memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, termasuk kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

5. Fungsi Perawatan Kesehatan

Kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan kepada anggota yang menghadapi masalah kesehatan.

Menurut BKKBN (1992) dalam Erfandi (2008), fungsi keluarga adalah:

1. Fungsi Keagamaan

Keluarga bertanggung jawab untuk memperkenalkan anak dan anggota lainnya kepada kehidupan beragama, serta tugas kepala keluarga untuk mengajarkan bahwa terdapat kekuatan yang mengatur kehidupan ini dan adanya kehidupan setelah mati.

2. Fungsi Sosial Budaya

Menjalin sosialisasi dengan anak, menetapkan norma tingkah laku yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, dan melanjutkan sejumlah nilai budaya keluarga.

3. Fungsi Cinta Kasih

Menciptakan suasana kasih sayang dan keamanan, serta saling memperhatikan kebutuhan masing-masing anggota keluarga.

4. Fungsi Melindungi

Menghindarkan anak dari tindakan yang tidak pantas, sehingga setiap anggota keluarga merasa aman dan terlindungi

5. Fungsi Reproduksi

Meneruskan garis keturunan, memberikan perawatan dan pendidikan kepada anak, serta menjaga kesejahteraan anggota keluarga

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Memberikan pendidikan kepada anak yang sesuai dengan fase perkembangan mereka, mendaftarkan anak ke sekolah, dan membimbing mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang baik

7. Fungsi Ekonomi

Mengidentifikasi sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur alokasi penghasilan, dan menabung untuk masa depan keluarga.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Mengatur cara hidup dengan tetap melestarikan lingkungan sekitar, baik fisik maupun sosial, serta memperhatikan lingkungan mikro, meso, dan makro.

Menurut Suliswati dan rekan-rekan (2005), fungsi keluarga dalam konteks kesehatan dan pencegahan gangguan jiwa meliputi beberapa aspek:

a. Fungsi Keluarga dalam kesehatan jiwa:

1. Pengembangan kepribadian anggota keluarga.
 2. Peran sebagai pelindung dan penyedia rasa aman bagi anggota keluarga.
 3. Fungsi sosialisasi yang mencakup kemampuan menjalin hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat.
- b. Fungsi Keluarga dalam pencegahan gangguan jiwa:
1. Membangun suasana yang mendukung kesehatan jiwa bagi seluruh anggota keluarga.
 2. Menunjukkan kasih sayang dan saling menghargai di antara anggota keluarga.
 3. Memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain dalam keluarga.
 4. Menjaga keterbukaan tanpa adanya diskriminasi di antara anggota keluarga.
 5. Memberikan pujian atas tindakan baik anggota keluarga daripada menghukum ketika mereka melakukan kesalahan.
 6. Menghadapi situasi tegang dengan tenang dan menyelesaikan masalah mendesak dengan cara yang wajar.
 7. Menunjukkan empati dan memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang mengalami perubahan perilaku, gangguan perkembangan, atau kepada lansia.
 8. Menghargai dan mempercayai satu sama lain.
 9. Menjalinkan hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya.
 10. Berkumpul dan berekreasi bersama untuk meredakan ketegangan dalam keluarga.

11. Melakukan aktivitas bersama untuk meningkatkan kebersamaan antar anggota keluarga.

Selain fungsi yang telah disebutkan, keluarga juga memiliki tanggung jawab dalam aspek kesehatan. Menurut Suliswati dan rekan-rekan (2005), tugas keluarga dalam konteks kesehatan meliputi:

1. Mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
2. Mengambil keputusan untuk mencari bantuan kesehatan bagi anggota keluarga yang sakit.
3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, memiliki cacat, atau yang tidak sakit tetapi memerlukan dukungan.
4. Menangani situasi darurat terkait kesehatan.
5. Menciptakan suasana keluarga yang mendukung kesehatan.
6. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat.

Friedman, 1981 (dalam Anonim, 2008), mengidentifikasi lima (5) tugas kesehatan yang perlu dilaksanakan oleh keluarga yaitu:

1. Memahami gangguan perkembangan kesehatan yang dialami oleh setiap anggota keluarga.
2. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat.
3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit dan yang tidak mampu merawat diri sendiri karena cacat atau usia yang sangat muda.
4. Menjaga suasana rumah yang mendukung kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga.

5. Menjaga hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.

Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk membentuk sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan nilai-nilai agama dan memiliki hubungan yang harmonis (Shihab, 2002). Ini menunjukkan bahwa dalam sebuah keluarga, penting untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis antar anggota. Terutama ketika pasien dengan gangguan jiwa kembali ke rumah, lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kekambuhan. Jika tidak ditangani oleh keluarga, hal ini bisa berujung pada perlunya perawatan kembali bagi pasien tersebut. Oleh karena itu, keluarga sebagai orang terdekat pasien harus selalu mengingatkan mereka untuk berdzikir kepada Allah Swt dan memberi teladan dalam beribadah.

Selain itu, keluarga harus berusaha menciptakan suasana harmonis agar pasien merasa diharapkan keberadaannya dalam keluarga, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Keluarga juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitarnya bahwa anggota keluarga yang sakit memerlukan dukungan. Menurut Kumfo (1995) dalam Videbeck (2008), perawat sebagai sumber dukungan sosial dapat berperan penting dalam proses penyembuhan pasien dengan gangguan jiwa. Meskipun anggota keluarga tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan jiwa, mereka sering kali menjadi bagian integral dalam proses penyembuhan.

Anggota keluarga sangat memerlukan dukungan dari keluarganya, karena hal ini membuat individu merasa dihargai, serta menunjukkan bahwa keluarga siap memberikan dukungan untuk mencapai tujuan hidupnya (Friedman, 1988 dalam

Saputra, 2010). Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menerima dukungan emosional dan fungsional cenderung lebih sehat dibandingkan yang tidak mendapatkan dukungan tersebut (Buchanan, 1995 dalam Videbeck, 2008). Saronson (1991 dalam Masbow, 2009) menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat dipandang sebagai keadaan yang bermanfaat bagi individu, yang diperoleh dari orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam kondisi ini, individu menyadari bahwa orang lain memperhatikan, menghargai, dan mencintainya.

Dukungan sosial keluarga dapat terdiri dari dukungan internal, seperti dari suami atau istri, maupun dukungan dari saudara kandung, serta dukungan eksternal bagi keluarga inti dalam jaringan sosial. Secara sederhana, jaringan sosial keluarga mencakup jaringan kerja sosial yang dimiliki keluarga itu sendiri (Friedman, 1998 dalam Akhmadi, 2009).

Friedman mengidentifikasi berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga, yakni:

1. Dukungan Emosional

Dukungan emosional memberikan pasien rasa nyaman dan perasaan dicintai, meskipun mereka menghadapi masalah. Bentuk dukungan ini mencakup semangat, empati, kepercayaan, dan perhatian, yang membuat individu merasa berharga. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi sebagai tempat bersandar dan memberikan motivasi kepada pasien, baik di rumah maupun di rumah sakit jiwa. Dukungan emosional berfokus pada pemeliharaan kondisi emosi dan ekspresi, dengan mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian. Hal ini

memberikan rasa nyaman, jaminan akan keberadaan, dan perasaan dicintai saat menghadapi masalah. Dukungan ini juga dapat memperkuat kembali perasaan dicintai jika stres mengurangi rasa tersebut. Namun, jika dukungan ini diabaikan dan tidak dikelola dengan baik, dapat berakibat pada hilangnya harga diri.

2. Dukungan Instrumental

Dukungan mencakup penyediaan bantuan fisik, seperti layanan, dukungan finansial untuk biaya pengobatan, serta bantuan material yang dapat langsung membantu menyelesaikan masalah. Ini termasuk bantuan praktis, seperti membantu tugas sehari-hari, menyediakan informasi, menjaga pasien yang sakit, dan menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai sumber untuk mencapai tujuan praktis. Meskipun setiap individu dengan sumber daya yang cukup dapat memberikan dukungan finansial atau perhatian untuk proses penyembuhan, dukungan yang nyata akan lebih efektif jika dihargai dengan tepat oleh penerima. Namun, jika dukungan tersebut menyebabkan perasaan tidak berdaya atau berutang, hal ini justru dapat menambah stres pada individu.

3. Dukungan Penghargaan

Dukungan penghargaan adalah bentuk dukungan yang diberikan keluarga kepada pasien dalam bentuk dorongan dan motivasi. Dukungan ini muncul ketika ada ekspresi penilaian positif terhadap individu. Dengan memiliki seseorang untuk diajak berbicara tentang masalah

yang dihadapi, pasien merasakan penghargaan positif dari keluarga, berupa penyemangat dan persetujuan terhadap ide serta perasaan mereka. Dukungan dari keluarga ini dapat meningkatkan strategi koping pasien dengan mengandalkan alternatif yang berfokus pada aspek positif berdasarkan pengalaman. Dalam konteks dukungan penghargaan, kelompok dukungan dapat memengaruhi cara pandang pasien terhadap ancaman yang dihadapi. Dukungan dari keluarga membantu pasien dalam mengatasi masalah dan mereinterpretasi situasi sebagai ancaman yang lebih kecil, di mana keluarga berperan sebagai pembimbing dengan memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan harga diri pasien.

4. Dukungan Informasional

Jaringan komunikasi dan tanggung jawab kolektif, termasuk penyediaan solusi untuk masalah yang dihadapi pasien, baik di rumah maupun di rumah sakit jiwa. Pemberian nasihat, pengarahan, saran, atau umpan balik mengenai tindakan individu juga merupakan bagian dari dukungan ini. Keluarga dapat memberikan informasi dengan merekomendasikan tempat, dokter, dan terapi yang sesuai, serta langkah-langkah spesifik untuk membantu individu mengatasi stres. Dalam dukungan informasional, keluarga berperan sebagai pengumpul dan penyampai informasi.

2.6 Tinjauan tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa

Beberapa definisi mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat ODGJ berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berbagai ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gangguan jiwa dijelaskan sebagai kondisi ketidakseimbangan mental yang menyebabkan perilaku atau sikap yang tidak normal. Selain itu, gangguan jiwa juga diartikan sebagai penyakit psikologis yang dapat menghambat kemampuan penyesuaian diri.

Menurut American Psychiatric Association atau APA, gangguan jiwa merupakan pola perilaku atau sindrom yang menunjukkan kondisi psikologis yang terganggu akibat tekanan yang dialami oleh individu. Abrams dan Stuart mendefinisikan gangguan jiwa sebagai sindrom yang berkaitan dengan gejala penderitaan atau ketidakmampuan dalam satu atau lebih fungsi penting seperti fungsi psikologis, perilaku, dan biologis. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada hubungan individu tetapi juga mempengaruhi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang terlihat melalui gejala perubahan perilaku. Individu dengan gangguan jiwa umumnya mengalami kondisi yang menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi manusia.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah mereka yang memiliki masalah yang berkaitan dengan kejiwaan, psikis, atau mental. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan

dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, serta menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi kehidupan.

Orang dengan gangguan jiwa sering dibandingkan dengan Orang dengan Masalah Kejiwaan yang merujuk pada individu dengan masalah fisik, mental, psikis, sosial, dan isu lainnya yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Perbedaan utama antara orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan terletak pada tingkat keparahan masalah yang dialami, di mana orang dengan masalah kejiwaan mengalami isu yang belum mencapai tingkat gangguan jiwa tetapi memiliki risiko tersebut, sedangkan orang dengan gangguan jiwa telah mengalami gangguan kejiwaan.

Ciri-ciri dan gejala gangguan jiwa dapat dikenali melalui beberapa tanda yang biasanya dialami oleh individu dengan gangguan tersebut:

1. Ketegangan (Tension)

Kondisi ini ditandai dengan perasaan murung, putus asa, cemas, gelisah, lemah, histeris, dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta munculnya pikiran-pikiran negatif

2. Gangguan Kognisi

Merujuk pada kesulitan individu dalam menyadari dan menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

3. Gangguan Persepsi dan Sensasi

Kondisi ini terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan merespons keadaan atau rangsangan di sekitarnya

4. Gangguan Kepribadian

Gangguan ini memengaruhi pola pikir, perilaku, dan perasaan seseorang yang mengakibatkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan.

5. Gangguan Pola Hidup

Ini adalah gangguan yang memengaruhi hubungan sosial individu, termasuk interaksi dengan keluarga dan berbagai agen sosial lainnya.

6. Gangguan Perhatian

Kondisi ini ditandai dengan kesulitan dalam berkonsentrasi atau fokus pada suatu hal.

7. Gangguan Kemauan,

Individu dengan gangguan jiwa umumnya mengalami kesulitan dalam menentukan keinginan mereka sendiri.

8. Gangguan Perasaan dan Emosi

Kondisinya berkaitan dengan kesulitan dalam merespons atau menunjukkan reaksi terhadap suatu hal, baik secara spontan maupun terencana.

9. Gangguan Berfikir

Gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghasilkan atau mengeluarkan ide atau gagasan, sehingga individu dengan gangguan jiwa cenderung tidak dapat menghasilkan ide dalam tindakan yang akan dilakukan.

10. Gangguan Psikomotor

Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan dalam melakukan gerakan tubuh, di mana kemampuan psikomotorik ini dipengaruhi oleh keadaan jiwa individu.

11. Gangguan Ingatan

Gangguan ini berhubungan dengan kesulitan dalam menyimpan informasi, peristiwa, atau kejadian, sehingga individu dengan gangguan jiwa sering kali kesulitan mengingat urutan atau mekanisme suatu peristiwa.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta eksploitasi dalam bentuk pemanfaatan secara ekonomi dan/atau seksual, dan diskriminasi.
2. Mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas yang mudah dijangkau.
3. Mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai data kesehatan jiwanya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya dari tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan jiwa.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Mendapatkan jaminan ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya.
6. Memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang dilakukan padanya.
7. Mendapatkan kebutuhan sosial yang sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, termasuk pendidikan, pekerjaan, keterampilan, rekreasi, spiritualitas, dan budaya.
8. Mengelola harta benda miliknya dan/atau yang diberikan kepadanya.